

SPT MASA & BUKTI POTONG **PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26**

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017



Aplikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah **perangkat lunak** yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk **membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26** dalam bentuk dokumen elektronik.

Tanda Tangan **ELEKTRONIK**

tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai **alat verifikasi dan autentikasi**.

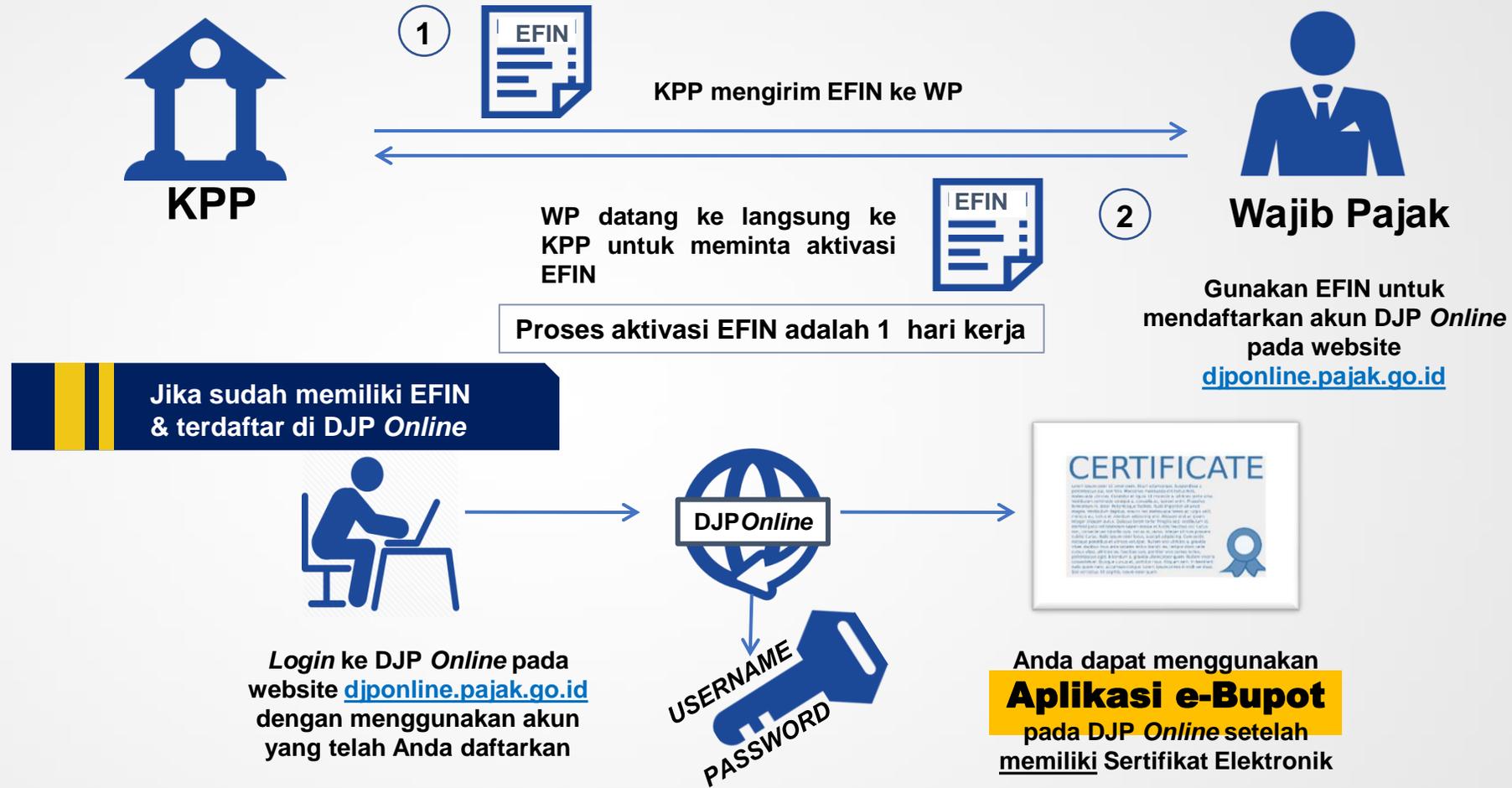
Sertifikat **ELEKTRONIK**

Digital Certificate adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang **menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik** yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

Kewajiban Pemotong PPh Pasal 23/26

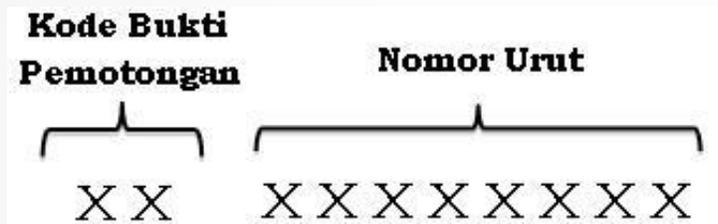
- 1.** **Membuat dan memberikan Bukti Pemotongan** kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap transaksi;
- 2.** Setiap Pemotong **wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT** ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak;
- 3.** Pemotong **tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 jika tidak ada transaksi pemotongan PPh Pasal 23/26 (NIHIL)** kecuali terdapat: *Surat Keterangan Bebas (SKB); dan/atau Surat Keterangan Domisili (SKD); dan/atau Ditanggung Pemerintah (DTP).*

Syarat untuk Menggunakan Aplikasi e-Bupot



Tata Cara Penerbitan Bukti Pemotongan

1. Standarisasi penomoran Bukti Pemotongan (Nomor Bukti Pemotongan terdiri dari 10 digit)



Kode Bukti Pemotongan diatur sebagai berikut:

- 3.1 untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kertas (*hardcopy*)
- 3.2 untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 kertas (*hard copy*)
- 3.3 untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 elektronik
- 3.4 untuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 elektronik

- ✓ Nomor Urut diberikan secara **berurutan**
- ✓ Penomoran atas formulir kertas **terpisah** dengan dokumen elektronik
- ✓ Nomor Urut Bukti Pemotongan pada Aplikasi e-Bupot 23/26 **di-generate oleh sistem**
- ✓ **Nomor tidak berubah** apabila terjadi pembetulan/pembatalan
- ✓ **Nomor tidak tersentralisasi** (Nomor dibuat untuk masing-masing Pemotong Pajak)

Tata Cara Penerbitan Bukti Pemotongan

2. Mencantumkan **NPWP** atau **NIK** (*jika tidak memiliki NPWP*)
3. Mencantumkan **nomor dan tanggal** Surat Keterangan Bebas
4. Mencantumkan **tanggal pengesahan** Surat Keterangan Domisili
5. **Menandatangani** Bukti Pemotongan
(*dalam hal menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26 berupa **Tanda Tangan Elektronik** yang melekat pada Sertifikat Digital*)
6. **Satu** Bukti Pemotongan untuk **satu** Wajib Pajak, **satu** kode objek pajak, dan **satu** Masa Pajak

Ketentuan Penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23



untuk...

1 **Wajib Pajak,
Kode Objek Pajak, dan
Masa Pajak**

*Pemotong Pajak dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan untuk **menggabungkan** dua atau lebih transaksi sepanjang memenuhi ketentuan di atas*

FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23		FORMULIR 1724 - III Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak Lembar ke-3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
	H.1 NOMOR :	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text"/>	
H.2 <input type="checkbox"/> Pembetulan Ke- ___		H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP :

A.2 NIK :

A.3 Nama : _____

A.4 Alamat : _____
Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____
Kota/Kabupaten : _____ Provinsi : _____ Kode Pos :

A.5 No. Telepon : _____

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak memiliki IIPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
			<input type="text"/>		

B.7 Dokumen Referensi : Nama Dokumen _____
Nomor Dokumen _____ Tanggal dd mm yyyy

B.8 PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB), Nomor : _____ Tanggal dd mm yyyy

B.9 PPh Pasal 23 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____
SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN :

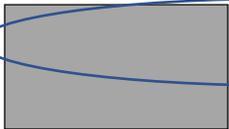
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP :

C.2 Nama Wajib Pajak : _____

C.3 Tanggal : dd mm yyyy

C.4 Nama Penandatangan : _____

C.5  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23

H. Bagian Header Formulir



Pembetulan, Pembatalan, Penambahan Bukti Pemotongan



Bukti Pemotongan

Bukti Pemotongan **PEMBETULAN**

Bukti Pemotongan yang dibuat untuk membetulkan **kekeliruan dalam pengisian** Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya.

Bukti Pemotongan **PEMBATALAN**

Bukti Pemotongan yang dibuat untuk membatalkan Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya **pembatalan transaksi**.

Ketentuan Pembetulan Bukti Pemotongan

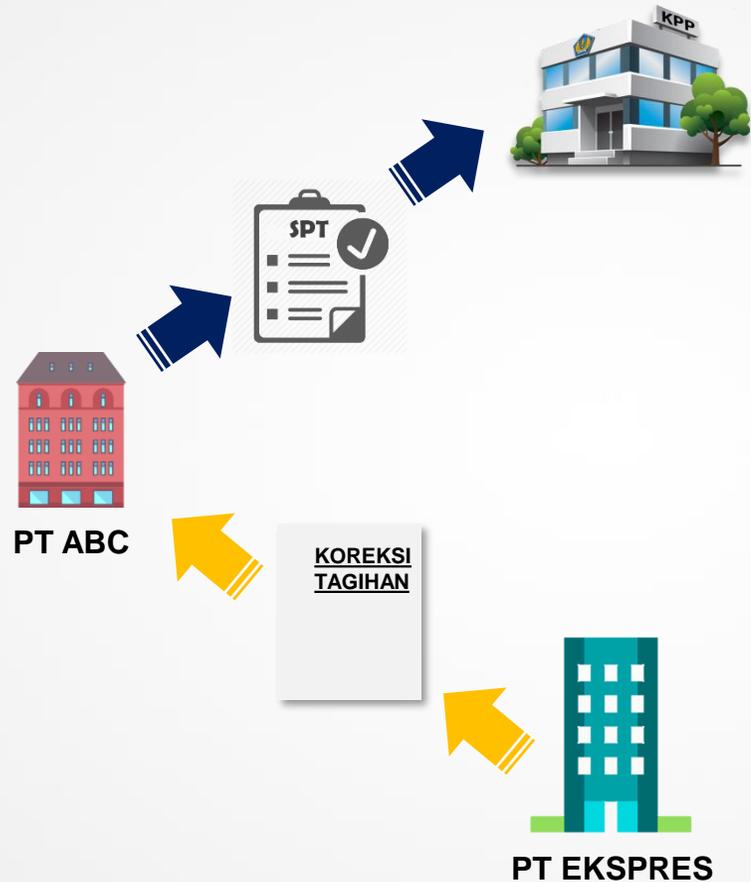
Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan, **kecuali** untuk nomor Bukti Pemotongan.

Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan pembetulan adalah **sama** dengan nomor pada Bukti Pemotongan sebelum dibetulkan.

Pemotong Pajak harus mengisi tanggal **sesuai tanggal diterbitkannya** Bukti Pemotongan pembetulan.

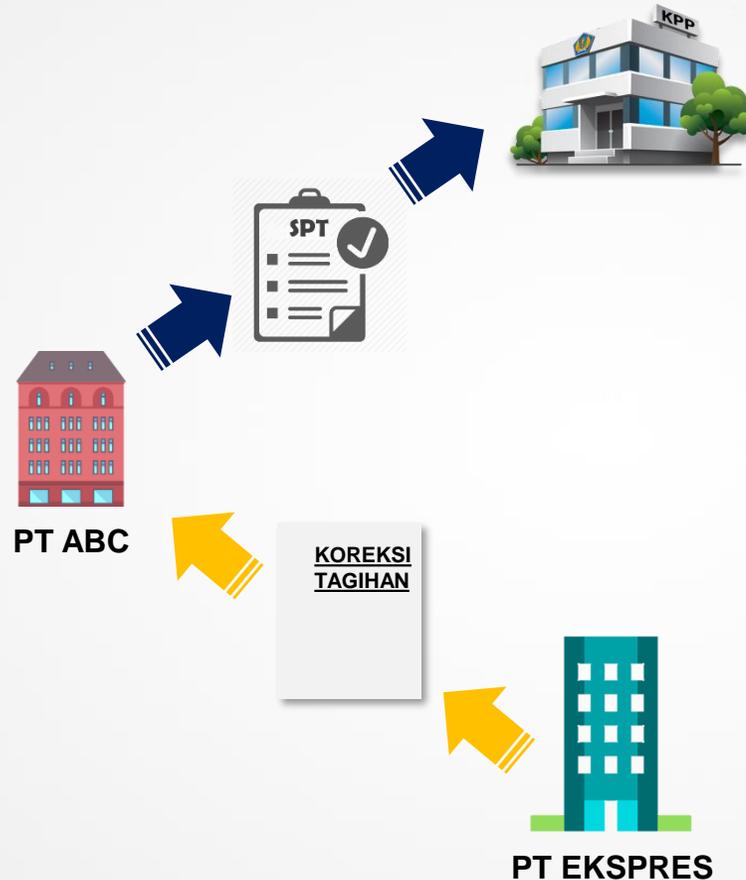
Pemotong Pajak harus melampirkan Bukti Pemotongan yang dibetulkan dengan Bukti Pemotongan pembetulan untuk selanjutnya **dilampirkan** dalam SPT pembetulan.

Contoh Pembetulan



- ✓ PT ABC di Jakarta **telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26** untuk Masa Pajak Maret 2017 pada tanggal 20 April 2017.
- ✓ Pada tanggal 25 April 2017, PT ABC menerima **koreksi tagihan** sewa kendaraan dari PT EKSPRES dimana semula sebesar Rp25.000.000,00 tetapi seharusnya sebesar Rp30.000.000,00.
- ✓ Atas kejadian tersebut, PT ABC di Jakarta **harus membetulkan** Bukti Pemoangan PPh Pasal 23 nomor 33-00000004 yang telah diterbitkan.

Contoh Pembetulan



Uraian	Bukti Pemotongan yang dibetulkan	Bukti Pemotongan pembetulan
Nomor	33-00000004	33-00000004
Pembetulan ke_	0	1
Identitas	PT EKSPRES	PT EKSPRES
Masa Pajak (mm-yyyy)	03-2017	03-2017
Kode Objek Pajak	24-100-02	24-100-02
Jumlah Penghasilan Bruto	25.000.000	30.000.000
Tarif	2	2
PPh yang Dipotong	500.000	600.000
Tanggal	30 Maret 2017	25 April 2017



Karena pembetulan Bukti Pemotongan tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh Pasal 23 yang harus dipotong menjadi lebih besar, maka PT ABC terlebih dahulu **harus membayar kekurangan** PPh Pasal 23-nya ke kas negara sebelum melaporkan SPT Pembetulan.

Surat Persetujuan Pembetulan Bukti Pemotongan

A. Untuk mencegah adanya penyalahgunaan mekanisme pembetulan Bukti Pemotongan oleh Pemotong.

B. Surat Persetujuan Pembetulan Bukti Pemotongan dibuat dalam hal:

- 1) pembetulan Bukti Pemotongan yang disebabkan adanya kesalahan pemotongan yang mengakibatkan **pajak yang dipotong lebih besar** daripada yang seharusnya dipotong; dan/atau
- 2) pembetulan Bukti Pemotongan yang disebabkan adanya **kesalahan pengisian NPWP**, yaitu NPWP yang tercantum dalam Bukti Pemotongan bukan NPWP Wajib Pajak yang seharusnya dipotong.

C. Surat Persetujuan Pembetulan Bukti Pemotongan dibuat untuk tiap **Bukti Pemotongan yang dibetulkan** pada angka 1) dan 2) di atas.

Surat Persetujuan Pembetulan Bukti Pemotongan

**SURAT PERSETUJUAN PEMBETULAN
BUKTI PEMOTONGAN**

Sehubungan dengan adanya:¹⁾

Kesalahan pemotongan yang mengakibatkan pajak yang dipotong lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong.

PPh yang telah dipotong : Rp.²⁾
PPh yang seharusnya dipotong : Rp.³⁾
PPh lebih dipotong : Rp.⁴⁾

Kesalahan pengisian NPWP, yaitu NPWP yang tercantum dalam Bukti Pemotongan bukan NPWP Wajib Pajak yang seharusnya dipotong.

NPWP tercantum ⁵⁾ :
NPWP seharusnya ⁶⁾ :

Atas Bukti Pemotongan ⁷⁾ : PPh Pasal 23 PPh Pasal 26

Masa Pajak ⁸⁾ :

Nomor ⁹⁾ :

Pembetulan Ke ¹⁰⁾ :

Dengan ini kami menyatakan persetujuan untuk membetulkan Bukti Pemotongan tersebut di atas. Penyelesaian kelebihan pemotongan dan/atau kesalahan pengisian NPWP menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....¹¹⁾, tanggal¹²⁾

PIHAK YANG MEMBUAT SURAT PERSETUJUAN:

Pemotong Pajak ¹³⁾ Nama : NPWP : Penandatanganan Nama : Jabatan : Tanda Tangan dan Cap:	<input type="checkbox"/> WP yang dipotong ¹⁴⁾ <input type="checkbox"/> WP yang seharusnya dipotong ¹⁵⁾ Nama : NPWP : Penandatanganan Nama : Jabatan : Tanda Tangan dan Cap:
--	---

Meterai

Ditandatangani oleh:

1. **Pemotong Pajak dan Wajib Pajak yang dipotong**, dalam hal pembetulan Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
2. **Pemotong Pajak dan Wajib Pajak yang seharusnya dipotong**, dalam hal pembetulan Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud pada angka 2).

Ketentuan Pembatalan Bukti Pemotongan

• Pembatalan Bukti Pemotongan dapat dilakukan dalam hal **transaksi** yang terutang PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 ternyata **dibatalkan**.

• Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan pembatalan adalah **sama** dengan nomor pada Bukti Pemotongan sebelum dibatalkan.

• Pemotong Pajak **harus** mengisi kolom “Jumlah Penghasilan Bruto” dan kolom “PPh yang Dipotong” dengan nilai NOL (“0”). Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada Bukti Pemotongan yang dibatalkan.

• Pemotong Pajak harus mengisi tanggal **sesuai tanggal diterbitkannya** Bukti Pemotongan pembatalan.

• Pemotong Pajak harus melampirkan Bukti Pemotongan yang dibatalkan dengan Bukti Pemotongan pembatalan untuk selanjutnya **dilampirkan** dalam SPT pembetulan, apabila SPT pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan dokumen kertas (*hard copy*).

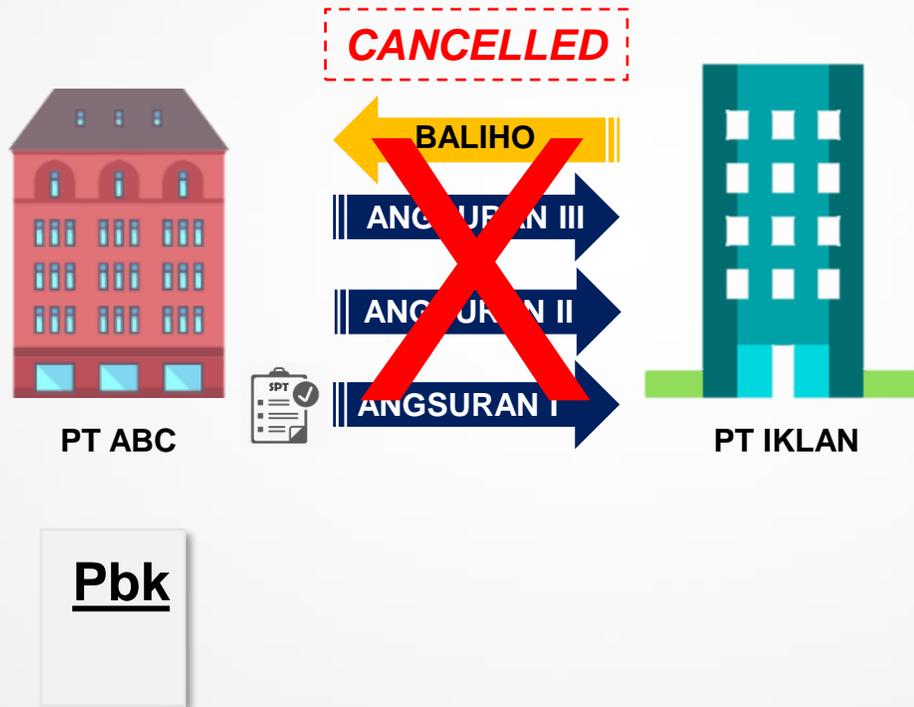


Contoh Pembatalan



- ✓ PT ABC pada 1 Juni 2017 membuat **kesepakatan** dengan PT IKLAN untuk membuat baliho dengan nilai kontrak sebesar Rp120.000.000,00. Biaya tersebut akan dibayar dalam **3 kali angsuran**.
- ✓ Atas pembayaran I sebesar Rp36.000.000,00 pada tanggal 25 Juni 2017, PT ABC baru bisa menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 pada tanggal 30 Juni 2017 dengan nomor 33-00000005. Atas Bukti Pemotongan tersebut, PT ABC **telah melaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Juni 2017**.
- ✓ Menjelang pembayaran kedua, PT ABC mengajukan komplain ke PT IKLAN karena baliho tidak sesuai dengan kesepakatan. PT ABC memutuskan untuk **membatalkan kontrak** serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk dikembalikan.

Contoh Pembatalan



Uraian	Bukti Pemotongan yang dibatalkan	Bukti Pemotongan pembatalan
Nomor	33-00000005	33-00000005
Pembatalan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Identitas	PT IKLAN	PT IKLAN
Masa Pajak (<i>mm-yyyy</i>)	06-2017	06-2017
Kode Objek Pajak	24-100-02	24-100-02
Jumlah Penghasilan Bruto	36.000.000	0
Tarif	2	2
PPH yang Dipotong	720.000	0
Tanggal	30 Juni 2017	25 Juli 2017

Karena pembatalan Bukti Pemotongan tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh Pasal 23 yang telah disetor lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka PT ABC menyampaikan SPT Pembetulan dan **mengajukan pemindahbukuan atas kelebihan** PPh Pasal 23 tersebut.

Ketentuan Penambahan Bukti Pemotongan

- Penambahan Bukti Pemotongan dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tetapi **belum dilakukan pemotongan atau penerbitan Bukti Pemotongan**.
- Nomor Urut yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan tambahan adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan formulir kertas yang **terakhir diterbitkan di bulan-bulan sebelumnya**.
- Dalam hal penambahan Bukti Pemotongan tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka Nomor Urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan formulir kertas yang **terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi**.



- Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan tambahan adalah **Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang** PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tersebut.
- tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan tambahan adalah **tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan tambahan**.
- Pemotong Pajak membetulkan SPT Masa** PPh Pasal 23/26 yg telah dilaporkan.

Penyebab Pembetulan SPT

Kesalahan Pengisian Bukti Pemotongan

- Pemotong Pajak melakukan pembetulan Bukti Pemotongan
- Melampirkan Bukti Pemotongan Pembetulan dalam SPT Pembetulannya

Pembatalan transaksi

- Pemotong Pajak melakukan pembatalan Bukti Pemotongan
- Melampirkan Bukti Pemotongan Pembatalan dalam SPT Pembetulannya

Transaksi yang **belum dilaporkan**

- Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan yang belum dibuat
- Pemotong Pajak menambahkan Bukti Pemotongan yang belum dilaporkan
- Melampirkan Bukti Pemotongan yang baru ke dalam SPT Pembetulannya



Aplikasi e-Bupot
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26

Perbandingan Aplikasi

Aplikasi e-Bupot

- Web base (djpOL)
- Bupot online (no. bupot by system, ttd elektronik)
- Sertel (Lapor SPT online)

Aplikasi e-SPT

- *Desktop Based*
- *Bupot offline*
- *Lapor SPT online atau offline*

Overview

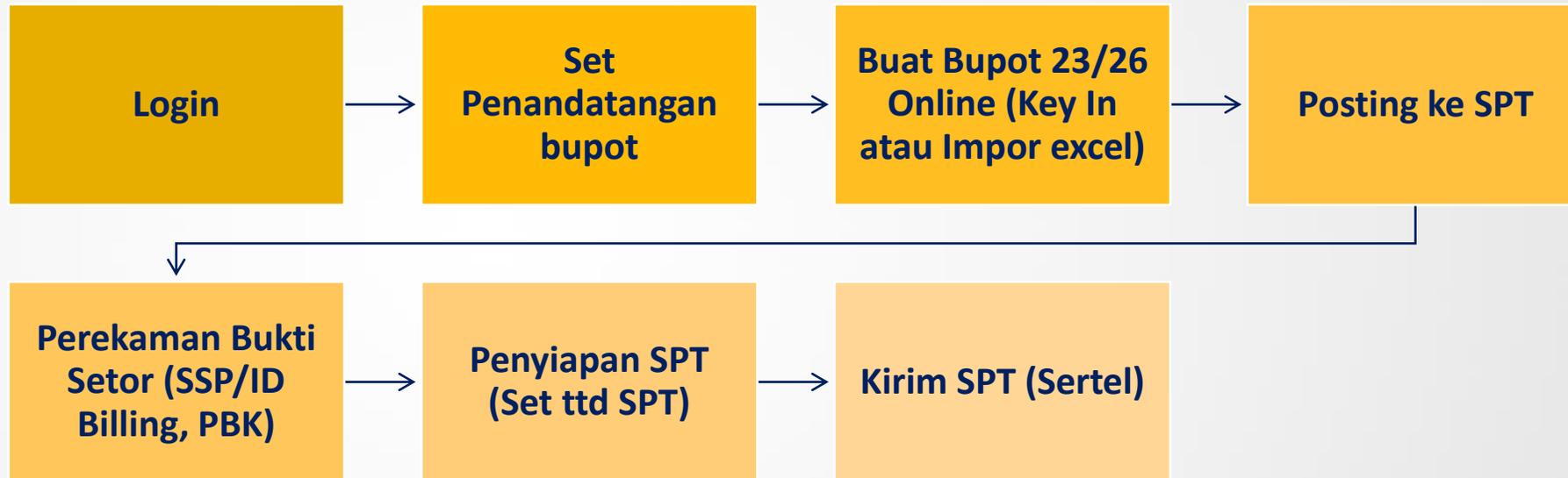
Aplikasi berbasis *web*:

- Akses via *browser*
- Terintegrasi dengan DJP Online dengan fitur Tanda Tangan Elektronik
- Perlu aktivasi EFIN, daftar DJP Online, dan aktivasi akun DJP Online
- Perlu mendaftarkan kepemilikan *file* SERTEL (sama dengan e-Faktur)
- Login* menggunakan NPWP dan *password*
- Signing* SPT menggunakan SERTEL
- Penomoran Bupot terpusat, unik per pemotong

Fitur

- Dashboard Pelaporan SPT Masa PPh 23/26
 - Buat Bukti Pemotongan PPh 23/26
 - *Key-in*
 - Impor Excel
 - Edit Bukti Pemotongan PPh 23/26
 - Hapus Bukti Pemotongan PPh 23/26
 - Pembetulan Bukti Pemotongan PPh 23/26
 - Pembatalan Bukti Pemotongan PPh 23/26
- Posting Bukti Pemotongan PPh 23/26
 - Hitung Tagihan
 - Rekam Data Penyetoran PPh 23/26
 - Posting Bukti Penyetoran PPh 23/26
 - Tanda Tangan SPT Masa PPh 23/26
 - Kirim SPT Masa PPh 23/26
 - Verifikasi Bukti Pemotongan PPh 23/26 (scan QR Code)
 - Verifikasi BPE SPT Masa PPh 23/26 (scan QR code)

Alur Penggunaan Aplikasi e-Bupot



Dashboard

DJP Online
One-Stop Tax Services

Dashboard | Bukti Pemotongan | SPT Masa PPh | Pengaturan | Bantuan

E-Bukti Potong

Selamat Datang, [TRI RIZKI AMALIA](#)

Petunjuk

Deskripsi Form: Form ini menyajikan daftar bukti potong pasal 26 yang telah Anda buat

Anda dapat melihat data masing-masing bukti potong dengan klik tombol lihat pada kolom aksi pada tabel yang tersaji

Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26

Tahun Pajak	Masa Pajak	Pembetulan Ke	Jumlah PPh Ps 23/26 Kurang Disetor (Rp)	Status SPT	Aksi
2017	8	1	98.500.000	Siap Kirim	Lengkapi Kirim
2017	8	0	24.600.000	Sudah Kirim	Lihat
2017	7	0	22.503.315	Siap Kirim	Lengkapi Kirim
2017	6	1	1.350.000	Lengkapi SPT	Lengkapi Kirim
2017	6	0	10.675.000	Sudah Kirim	Lihat

Menampilkan 1 sampai 5 dari 7 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [2](#) [Selanjutnya](#)

<https://djponline.pajak.go.id>

Pembuatan Bupot 23

☑ Perekaman Bukti Potong Pasal 23

Perekaman Bukti Potong Baru

Identitas Wajib Pajak Yang Dipotong

Tahun Pajak	Select	Masa Pajak	Select
Identitas	<input type="radio"/> NPWP	<input type="radio"/> NIK	
NPWP	NPWP		
Nama	Nama		
Alamat	alamat		
Kelurahan/Desa	kelurahan/desa	Kecamatan	kecamatan
Kota/Kabupaten	kota/kab	Propinsi	propinsi
Kode Pos	kode pos		

Pembuatan Bupot 23

Dokumen

Dasar Pemotongan

[Tambah +](#)

Nama Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Aksi
Tidak ditemukan data yang sesuai			

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

[Sebelumnya](#) [Selanjutnya](#)

Tanpa Fasilitas

PPh Pasal 23 Dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Nomor SKB [Cari](#)

Tanggal

PPh Pasal 23 Ditanggung Oleh Pemerintah berdasarkan

Impor Excel

Unggah Bukti Potong

NPWP

Jenis Bukti Potong

File (*.xls) No file chosen

Impor Excel

Daftar Dokumen

Refresh

Nomor Tiket	Tahun Pajak	Tanggal Upload	Jumlah Baris	Status	Keterangan Upload
103	2017	29-08-2017 03:22:55	11	Error validasi Lihat	Terdapat draft Bukti Potong yang gagal di-generate !
96	2017	28-08-2017 13:30:33	11	Error validasi Lihat	Terdapat draft Bukti Potong yang gagal di-generate !
95	2017	28-08-2017 09:25:00	0	Excel gagal ke db	File tidak dapat di buka !
94	2017	28-08-2017 09:24:24	11	Error validasi Lihat	Terdapat draft Bukti Potong yang gagal di-generate !
93	2017	25-08-2017 15:48:39	11	Error validasi Lihat	Terdapat draft Bukti Potong yang gagal di-generate !

Menampilkan 1 sampai 5 dari 11 entri

Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya

Posting Bupot ke SPT (Lampiran I)

The screenshot shows the DJP Online web application interface. The browser address bar displays the URL `10.254.208.182/bupot/posting`. The page header includes the DJP Online logo and navigation links for Dashboard, Bukti Pemotongan, SPT Masa PPh, Pengaturan, and Bantuan. The main content area is titled "E-Bukti Potong" and shows a "Posting" section. In this section, the "Tahun Pajak" (Tax Year) is set to 2017 and "Masa Pajak" (Tax Period) is set to 6. A green "CARI" button with a magnifying glass icon is used to search for data. Below the search filters, a table with columns "Nomor Bukti Pemotongan", "Identitas", and "Nama Dipotong" is shown. The table is currently empty, with a message "Tidak ditemukan data yang sesuai" (No data found that matches) displayed. At the bottom of the table area, there are "Sebelumnya" (Previous) and "Selanjutnya" (Next) buttons, and a "Posting" button.

DJP Online
One Stop Tax Services

Dashboard Bukti Pemotongan SPT Masa PPh Pengaturan Bantuan

E-Bukti Potong Selamat Datang, TRI RIZKI AMALIA

Posting

Tahun Pajak: 2017 Masa Pajak: 6 **CARI**

Nomor Bukti Pemotongan	Identitas	Nama Dipotong
Tidak ditemukan data yang sesuai		

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Sebelumnya Selanjutnya **Posting**

Rekam Data Penyetoran

DJP Online
One-Stop Tax Services

Dashboard | Bukti Pemotongan | SPT Masa PPh | Pengaturan | Bantuan

Input Bukti Penyetoran

Jumlah Tagihan Per Masa Pajak

Tahun Pajak: 2017 | Masa Pajak: 8

Nomor	Kode Objek Pajak	Jenis Pajak	Jenis Setoran	PPH yang Dipotong/DTP (Rp)
1	411124100	411124	100	91.000.000
2	411127100	411127	100	7.500.000

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

Panel Perekaman Bukti Penyetoran

Input Bukti Setor

No	Nomor Bukti	Jenis Pajak	Jenis Setoran	Tahun	Masa	Jumlah (Rp)	Tanggal Setor	Aksi
1	PBK02	411127-PPH Pasal 26	100-Masa	2017	0808	70.000.000	28-08-2017	Hapus
2	213454	411124-PPH Pasal 23	100-Masa	2017	0808	500.000	28-08-2017	Hapus
3	PBK01	411124-PPH Pasal 23	100-Masa	2017	0808	91.000.000	28-08-2017	Hapus

<https://djponline.pajak.go.id>

Rekam Data Penyetoran

Bukti Penyetoran

Jenis Bukti Penyetoran Surat Setoran Pajak
 Pemindahbukuan

Nomor Bukti Penyetoran ABCDEFG1234567

Tahun Pajak

Pilih

- Pilih
- 2019
- 2018
- 2017

Simpan

Bukti Penyetoran

Jenis Bukti Penyetoran Surat Setoran Pajak
 Pemindahbukuan

Nomor Bukti Pemindahbukuan NOMOR-PBK/KP/2019

Cek Pemindahbukuan

Simpan

Dashboard Penyiapan SPT

DJP Online
One Stop Tax Services

Dashboard | Bukti Potongan | SPT Masa PPh | Pengaturan | Bantuan

Selamat Datang, **TRI RIZKI AMALIA**

E-Bukti Potong

Petunjuk

Deskripsi Form: Form ini menyajikan daftar bukti potong pasal 26 yang telah Anda buat

Anda dapat melihat data masing-masing bukti potong dengan klik tombol lihat pada kolom aksi pada tabel yang tersaji

Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26

Tahun Pajak	Masa Pajak	Pembetulan Ke	Jumlah PPh Ps 23/26 Kurang Disetor (Rp)	Status SPT	Aksi
2017	8	1	98.500.000	Siap Kirim	Lengkapi Kirim
2017	8	0	24.600.000	Sudah Kirim	Lihat
2017	7	0	22.503.315	Siap Kirim	Lengkapi Kirim
2017	6	1	1.350.000	Lengkapi SPT	Lengkapi Kirim
2017	6	0	10.675.000	Sudah Kirim	Lihat

Menampilkan 1 sampai 5 dari 7 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [2](#) [Selanjutnya](#)

<https://djponline.pajak.go.id>

Posting Bukti Setor ke SPT

The screenshot displays the 'E-Bukti Potong' (E-Cut-off) interface on the DJP Online portal. The page is titled 'E-Bukti Potong' and shows the user 'Selamat Datang TRI RIZKI AMALIA'. The main content area is divided into several sections:

- Petunjuk**: A green header for a guide section, which is currently empty.
- Data SPT**: A section titled 'Lengkapi SPT Masa' (Complete SPT Period) containing two sub-sections:
 - Identitas SPT**:

Masa Pajak	8
Tahun Pajak	2017
 - A. Identitas Pemotong Pajak**:

NPWP	440249498416000
Nama	TRI RIZKI AMALIA
- Daftar Bukti Penyetoran**: A table listing tax payment receipts under the heading 'PPH Pasal 23'.

Jenis	Periode	KAP	KJS	NTPN/No Bukti PBK	Tanggal Setor	Jumlah PPh Disetor (Rp)	Keterangan
Masa	0808-2017	411124	100	PBK01	2017-08-28	91.000.000	Sudah masuk SPT
Masa	0808-2017	411124	100	213454	2017-08-28	500.000	Sudah masuk SPT

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

Navigation: [Sebelumnya](#) | **1** | [Selanjutnya](#)
- PPH Pasal 26**: A section header for the next part of the data, which is currently empty.

Kirim SPT (Penandatanganan)

DJP Online
One-Stop Tax Services

Deskripsi Form: Form ini menyajikan daftar bukti potong pasal 26 yang telah Anda buat

Anda dapat melihat data masing-masing bukti potong dengan klik tombol lihat pada kolom aksi pada tabel yang tersaji

Kirim SPT

Sertifikat Elektronik(PFX/P12) No file chosen

Passphrase

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Bertindak sebagai

Nama

Bukti Penerimaan Elektronik

The screenshot shows the DJP Online interface with a modal window titled "Lihat Bukti Penerimaan Elektronik". The modal displays the following information:

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email : pengaduan@pajak.go.id ; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 31788807122174246109

NPWP	:440249498416000
Nama	:TRI RIZKI AMALIA
Jenis Pajak	:PPH2326
Pembetulan Ke-	:0
Tanggal Terima	:12-07-2017
Tahun Pajak	:2017
Masa Pajak	:8

QR Code
RN2JP9VN

Terima Kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 entri

Verifikasi Bukti Pemotongan (Output Scan QR Code)

DJP Online
Dip. Bagi Tax Services

Verifikasi Bukti Potong

Panel Verifikasi

Panel Input

MixCode

Kode Keamanan 

Captcha

Panel Data

NPWP Pemotong	440249498416000
Nomor Bukti Pemotongan	3400000003
ID Dipotong	1234567
Objek Pajak / Masa Pemotongan	27-100-01 / 6-2017
Penghasilan Bruto / PPh Dipotong	50.000.000 / 10.000.000
Status Bukti Potong	Dibatalkan
Status Laporan	Dalam Proses Pelaporan

Verifikasi Bukti Potong

Data Bukti Potong Ditemukan

Verifikasi BPE(Output Scan QR Code)

The screenshot displays the DJP Online web application interface for BPE verification. A modal window titled "Verifikasi BPE" is open, displaying the message "Data Bukti Penerimaan Elektronik Ditemukan" (Electronic Receipt Evidence Found) and an "ok" button. The background interface is dimmed and shows the "Panel Verifikasi" section with two sub-panels: "Panel Input" and "Panel Data".

Panel Input:

- MixCode: Kode
- Kode Keamanan: wfbbb4
- Captcha: [Image]
- Verify button

Panel Data:

Nomor Tanda Terima Elektronik	31498807143174255111
NPWP	440249498416000
Jenis Pajak	PPH2326
Pembetulan Ke	0
Tanggal Terima	25-08-2017
Masa Pajak	6-2017

Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  [DitjenPajakRI](https://www.facebook.com/DitjenPajakRI)  [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI)  [DitjenPajakRI](https://www.youtube.com/DitjenPajakRI)  [1500-200](tel:1500-200)

